

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Ada tiga pilar utama penggerak ekonomi di Indonesia, diantaranya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Koperasi sebagai salah satu penggerak perekonomian di Indonesia belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah Koperasi di Indonesia adalah 212.135 unit di akhir tahun 2015 dengan jumlah anggota sebanyak 37.783.160 orang dan total nilai Sisa Hasil Usaha (SHU) senilai 17.320.663,92 juta rupiah. Dalam peringatan hari Koperasi Nasional ke-70 presiden Indonesia Joko Widodo menyebutkan bahwa koperasi menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional 3,9 persen dan berharap akan terus meningkat seperti negara Eropa, Perancis, Belanda, dan Selandia Baru sebesar 18 dan 20 persen (<http://detik.com> [15 Juli 2017]). Koperasi diharapkan dapat mensejajarkan diri dengan BUMN dan BUMS sebagai soko guru perekonomian Indonesia.

Berdasarkan laporan monitor yang diterbitkan ICA (*International Co-operative Alliance*) tahun 2015, dikemukakan fakta bahwa 72% populasi di Finlandia, 50% populasi di Kanada, 30% populasi di Uruguay merupakan anggota dari suatu koperasi. Selain itu di Singapura, 25% dari populasinya adalah anggota dari suatu koperasi. Koperasi-Koperasi dari negara Perancis, Jerman, Amerika, Jepang dan Republik Korea mendominasi jejeran teratas dalam ICA Global 300 atau 300 Koperasi terbesar didunia. Sebut saja Groupe Credit Agricole dan

Groupe BPCE (Koperasi simpan pinjam di Perancis) mampu menghasilkan pendapatan masing-masing 90,21 dan 68,96 milyar dolar amerika. Diposisi lain, perusahaan Koperasi BVR yang berasal dari Jerman dengan bidang yang sama mampu menghasilkan pendapatan 70,05 milyar dolar. Jepang dan Republik Korea juga berada dideret atas dengan mengunggulkan Koperasi agrikultur dan industri makanan yang dimilikinya. Sementara, hanya Koperasi di Malaysia dan Singapore yang menjadi perwakilan Asia Tenggara yang masuk dalam jajaran 300 Koperasi terbesar di dunia.

Menurut Partomo S.T dan Abdul Rahman S. (2002:76) perkembangan usaha Koperasi sangat ditentukan oleh besar kecilnya dana atau modal yang digunakannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa semakin berkembangnya kegiatan usaha Koperasi dewasa ini, maka semakin besarlah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha Koperasi. Hal itu berarti semakin besar pula tanggung jawab manajemennya.

Dalam perkembangannya, Koperasi di Indonesia dihadapkan oleh berbagai persoalan yang menjadi faktor penghambat dalam mengembangkan kinerja Koperasi di Indonesia. Sejumlah 62 ribu unit Koperasi telah dihapus dari database Kementerian dengan berbagai faktor penyebab penghapusan tersebut, seperti unit, usaha dan pengurusnya sudah tidak ada, kemudian Koperasi tersebut terjerat hukum mulai dari penggelapan, penipuan, dan korupsi. Bahkan banyak oknum yang membuat Koperasi hanya untuk menarik dana bantuan atau hibah dari pemerintah daerah maupun pusat, tetapi tidak ada usahanya (Tempo, 2015). Lemahnya sistem pelaporan keuangan yang ada dan juga lemahnya sumber daya

manusia, sering menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap penggunaan dana keuangan Koperasi (Indrawati & Donny, 2007).

Salah satu karakteristik yang membedakan Koperasi dengan badan usaha lain adalah Koperasi didirikan, dimodali, dibiayai, diatur, dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya. Namun dewasa ini, pengelolaan Koperasi tidak hanya berfokus pada anggota, tetapi juga melibatkan masyarakat termasuk non anggota. Peranan non anggota dalam Koperasi bisa menjadi konsumen ataupun juga menjadi pemberi modal pinjaman seperti yang banyak terjadi saat ini. Modal yang berasal dari non anggota dapat berbentuk modal pinjaman ataupun juga modal sumbangan ataupun hibah dari pemerintah. Secara tidak langsung, keadaan ini menyebabkan bertambahnya pengguna laporan keuangan Koperasi yang tersaji secara andal. Pelaporan keuangan Koperasi tidak terbatas sebagai bentuk tanggung jawab manajemen kepada anggota tetapi juga pada pemerintah dan masyarakat non anggota yang telah menyertakan dana dalam pengelolaan Koperasi.

Penggunaan pelayanan jasa audit eksternal dapat menjadi salah satu solusi mengatasi masalah ini. Jasa audit eksternal dapat menambah nilai keakuratan dan keandalan suatu laporan keuangan. Selain itu, audit bisa menjadi sarana untuk mendeteksi adanya kecurangan. Kell, Boynton dan Ziegler (2001) menjelaskan bahwa laporan keuangan yang diaudit mempunyai dampak yang cukup menguntungkan bagi efisiensi dan integritas karyawan. Berdasarkan teori agensi, permintaan audit akan timbul akibat adanya *information asymmetries* dan konflik kepentingan antara pemilik dan agen. Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan

bahwa laporan keuangan yang telah diaudit dapat menjadi solusi dalam biaya keagenan yang muncul dari pemisahan kepemilikan dan pengendalian dalam organisasi.

Namun, sayangnya hingga saat ini masih banyak Koperasi yang tidak menggunakan audit eksternal. Beberapa alasan tidak diterapkannya audit eksternal pada Koperasi diantaranya : (a) audit internal Koperasi sudah andal; (b) anggota masih percaya kepada pengurus dalam mengelola permodalan Koperasi; (c) laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku; (d) biaya audit eksternal yang terlalu tinggi bagi Koperasi; (e) permodalan Koperasi menurun; dan (f) Koperasi sudah rutin melaksanakan RAT dan ada Dewan Pengawas Koperasi (Ayu *et.al*, 2017).

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) menggratiskan biaya audit akuntan publik kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang skala usahanya Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. (<http://www.poskotanews.com> [21 Februari 2017]). Pemberian fasilitas ini kepada Koperasi akan mendorong permintaan audit bagi Koperasi sehingga dapat meminimalisasi adanya tindak penyelewengan yang dapat merugikan anggota Koperasi. Pengauditan secara berkala bagi KSP akan mengindikasikan pula adanya ketaatan dan kepatuhan manajemen Koperasi terhadap aturan terutama pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 15/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Januarti dan Nasir (2006) mengatakan tanggung jawab manajemen diwujudkan dalam laporan keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau waktu-waktu tertentu. Laporan keuangan merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban yang akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan ekonomis, sehingga laporan keuangan harus mencerminkan secara wajar, kejadian-kejadian badan usaha Koperasi.

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi permintaan audit telah banyak dilakukan, seperti pada penelitian Oyong Lisa yang beberapa kali meneliti mengenai permintaan jasa audit eksternal pada Koperasi pada 2013, 2014, dan 2015. Pada penelitian Lisa (2013) ditemukan hasil bahwa hanya anggota Koperasi saja yang mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal pada Koperasi di Jawa Timur. Sedangkan variabel skala Koperasi dan jumlah kewajiban tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal. Namun, pada penelitian Lisa *et.al* (2014) pada objek penelitian yang sama dengan menjadikan permintaan audit sebagai variabel intervening didapat hasil berbeda yaitu hanya jumlah anggota dan skala Koperasi saja yang berpengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit eksternal. Selanjutnya Lisa (2015) meneliti mengenai karakteristik Koperasi yang memberikan pengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal dengan memasukkan variabel jumlah anggota, skala Koperasi, jumlah kewajiban, struktur modal, dan tingkat keuntungan sebagai variabel bebas dalam penelitiannya. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa hanya struktur modal yang tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan jasa audit sedangkan variabel jumlah anggota, skala Koperasi, jumlah kewajiban, dan tingkat keuntungan memiliki pengaruh yang signifikan.

Rafika Sary *et.al* (2014) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa jumlah anggota tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa audit

hanya variabel volume usaha dan likuiditas yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa audit. Di sisi lain, pada penelitian Yonanda Oriza (2015) ditemukan bahwa volume usaha tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit pada Koperasi di kota Bukittinggi. Namun, variabel jumlah anggota, likuiditas, dan jumlah kewajiban Koperasi menunjukkan hasil yang signifikan terhadap permintaan jasa audit.

Penelitian lain dilakukan oleh Peter Carey dan George Tanewski (2013) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa permintaan audit pada bisnis perkebunan di Australia memiliki hubungan positif dengan *budgeting*. Perusahaan yang memiliki sistem perencanaan yang baik memiliki kecenderungan untuk melakukan permintaan audit yang mana variabel *size* dan *debt* dalam penelitian ini menjadi variabel yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *budgeting* dan juga mempengaruhi permintaan audit.

Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Daniar *et.al* (2014) yang menyatakan bahwa skala Koperasi dan jumlah kewajiban tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan jasa audit eksternal pada Koperasi di kabupaten Lumajang. Hanya variabel jumlah anggota yang memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan jasa audit.

Elisabeth Dedman *et.al* (2013) menyatakan dalam hasil penelitiannya mengenai permintaan audit pada perusahaan privat di Inggris bahwa perusahaan dengan *agency costs* yang tinggi memiliki hubungan positif dengan ukuran perusahaan, kompleksitas, rasio ungkitan, penyebaran kepemilikan, dan ukuran dewan lebih mungkin untuk melakukan audit secara sukarela. Maaten Corten *et.al*

(2015) juga melakukan penelitian mengenai permintaan jasa auditor pada perusahaan privat keluarga dengan menguji variabel kepemilikan manajer, generasi keluarga, dan *leverage* sebagai variabel yang diujikan. Dari penelitian tersebut didapat hasil bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan jasa auditor pada generasi berikutnya dalam perusahaan privat keluarga.

Penelitian ini akan mengamati pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, dan jumlah anggota terhadap permintaan jasa audit eksternal. Hal ini didasarkan pada adanya perbedaan pendapat atas hasil penelitian terdahulu. Diantaranya, dalam penelitian yang dilakukan Lisa (2013) disebutkan bahwa hanya jumlah anggota yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap permintaan jasa audit eksternal. Hal senada diungkap pula dalam penelitian Oriza (2015) dan Daniar *et.al* (2014). Namun, hasil berbeda diperoleh dalam penelitian Sary *et.al* (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara jumlah anggota Koperasi dengan permintaan audit. Selain itu, pada penelitian Carey *et.al* (2013) dinyatakan bahwa *size* atau ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan jasa audit yang didukung pula pada penelitian Dedman *et.al* (2013). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Daniar *et. al* (2014) dan Lisa (2013) yang menyatakan bahwa skala Koperasi tidak memiliki pengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal. Variabel *leverage* yang diuji pada penelitian Dedman *et.al* (2013) memperlihatkan hasil yang signifikan terhadap permintaan audit pada perusahaan privat di Inggris. Namun, hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Corten *et.al* (2015) yang menyatakan

bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap penggunaan jasa audit pada perusahaan privat keluarga di Amerika Serikat di generasi berikutnya.

Objek penelitian kali ini adalah Koperasi dikarenakan saat ini Koperasi sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat dan mendapatkan perhatian yang cukup tinggi dari pemerintah maupun masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan penghargaan Satya Lencana Pembangunan Koperasi pada 2016 dari Presiden Joko Widodo kepada Airin Rachmi Diany sebagai Wali Kota Tangerang Selatan (<http://merdeka.com>[22 Februari 2017]). Koperasi menjadi objek penelitian yang menarik karena memiliki karakteristik istimewa yang berbeda dengan badan usaha lainnya. Penelitian diharapkan dapat menambah bukti empiris dan juga memberikan konfirmasi mengenai penelitian-penelitian terdahulu.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Koperasi di Indonesia belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan bagi PDB Indonesia walaupun termasuk dalam tiga pilar utama penggerak ekonomi Indonesia.
2. Kinerja Koperasi Indonesia terhambat dikarenakan oleh beberapa persoalan diantaranya penggelapan, penipuan, atau Koperasi hanya dijadikan sebagai ajang mendapatkan dana dari pemerintah tanpa adanya pengelolaan yang baik

dan benar. Selain itu, lemahnya sistem pelaporan keuangan Koperasi juga menjadi faktor penghambat berkembangnya Koperasi.

3. Penggunaan jasa audit eksternal sebagai salah satu solusi untuk menambah keakuratan dan keandalan laporan keuangan Koperasi masih jarang digunakan dikarenakan berbagai alasan.
4. Hasil penelitian terdahulu mengenai faktor *leverage*, ukuran perusahaan, dan jumlah anggota Koperasi mempengaruhi permintaan jasa audit eksternal menunjukkan hasil yang berbeda-beda.

### **C. Pembatasan Masalah**

Setelah mengidentifikasi masalah yang disebutkan diatas, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti pada point ke 4 yaitu dengan menggunakan *leverage* sebagai X1, ukuran perusahaan sebagai X2, jumlah anggota sebagai X3 dengan melihat pengaruhnya terhadap permintaan jasa audit eksternal sebagai variabel Y.

### **D. Rumusan Masalah**

Pada latar belakang masalah telah diuraikan sebelumnya mengenai jasa audit dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kinerja Koperasi. Namun untuk mendorong permintaan jasa audit tersebut terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Untuk itu dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu : *“Apakah leverage, ukuran perusahaan, dan*

*jumlah anggota berpengaruh terhadap permintaan jasa audit eksternal pada Koperasi di kota Tangerang Selatan?”*

## **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah:

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkuat teori yang telah dibangun sebelumnya terutama teori pemangku keagenan (*agency theory*). Penelitian ini akan menambah bukti empiris mengenai konflik kepentingan dalam badan usaha Koperasi dapat mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan permintaan audit eksternal guna melakukan verifikasi laporan kinerja ekonomi.

### **2. Kegunaan Praktis**

1. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi yang relevan dengan fokus kajian yang sama dalam penelitian ini.
2. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP), diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran pola permintaan audit pada suatu badan usaha Koperasi.
3. Bagi pemerintah khususnya Menteri Koperasi dan UKM, hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberi masukan dalam mendorong

adanya kenaikan permintaan jasa audit pada badan usaha Koperasi melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya yang diteliti dalam penelitian ini.

